

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal, khususnya dalam aspek keuangan daerah. Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki secara mandiri (Indah & Kuntadi, 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Sumber keuangan independen dari wilayah itu sendiri yang harus diperluas, untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan yang terus meningkat.

Secara ideal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset tetap serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Aset tetap daerah merupakan bagian dari BMD yang memiliki potensi

ekonomi dan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang apabila dikelola secara efektif dan efisien (Al Farisi et al., 2024). Aset tetap meliputi tanah, mesin, gedung, jalan, irigasi, serta jaringan aset tetap lainnya yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu pengelolaan aset tetap tidak hanya berfokus pada aspek pencatatan administratif, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai ekonomis aset sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah yang optimal berpengaruh terhadap peningkatan PAD (Fadilah, 2025).

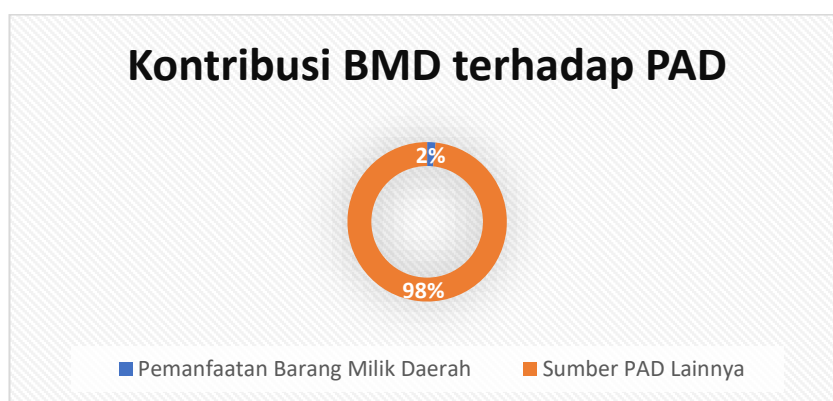


Gambar 1. 1 Diagram Perbandingan

Berdasarkan data yang diambil dari LKPD provinsi Jawa Barat, dapat diketahui bahwa nilai aset tetap daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 nilai aset tetap daerah sebesar Rp25,2 triliun dan meningkat menjadi Rp28,9 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya ekonomi yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal serupa juga

terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan dari Rp18,5 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp25,3 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aset tetap daerah memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan PAD.

Sementara itu pemanfaatan BMD yang diukur melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai pemanfaatan BMD sebesar Rp401,7 miliar kemudian meningkat menjadi 414,7 pada tahun 2021, Rp468,9 miliar pada tahun 2022, dan mencapai Rp541,1 miliar pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi Rp430,6 miliar. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan aset tetap daerah belum sepenuhnya stabil dan optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.



Gambar 1. 2 Kontribusi BMD terhadap PAD

Meskipun nilai aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan dan PAD menunjukkan tren yang positif, kontribusi pemanfaatan BMD terhadap PAD masih tergolong rendah. Berdasarkan gambar diatas pemanfaatan BMD hanya menyumbang sekitar 2% terhadap total PAD pada tahun

2024, sementara 98% lainnya berasal dari sumber pendapatan daerah lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa BMD belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, padahal pemerintah daerah memiliki aset tetap dengan nilai yang cukup besar. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi aset daerah yang dimiliki dengan hasil pemanfaatannya dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Secara regulatif pengelolaan aset daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan aset adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna tanpa mengubah status kepemilikan aset.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan BMD khususnya melalui mekanisme seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, atau bentuk optimalisasi lainnya, dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan aset dan sumber daya yang dimiliki daerah tidak hanya mendukung penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga

berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan PAD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengelolaan BMD memiliki pengaruh positif terhadap PAD melalui pemanfaatan aset yang lebih produktif dan bernilai ekonomis (Sari et al., 2023).

Pada saat Barang Milik Daerah dimanfaatkan secara optimal, hal tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan aset daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi aset merupakan suatu proses pengelolaan yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi aset dari berbagai aspek, seperti fisik, nilai, kuantitas, lokasi, ekonomi, dan legalitas. Pengelolaan aset yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Fauziah & Mediawati, 2024).

Beberapa masalah utama dalam pengelolaan aset tetap dan barang milik daerah yang diidentifikasi meliputi ketidaklengkapan data dan informasi, di mana banyak pemerintah daerah masih kesulitan memperoleh data aset yang akurat dan terkini sehingga pengelolaan menjadi tidak efektif. Selain itu minimnya pemanfaatan aset sering terjadi karena aset yang dimiliki jarang dimaksimalkan melalui cara sewa, operasional harian, atau pengembangan lebih lanjut. Tantangan administratif juga kerap muncul dengan prosedur pengelolaan yang rumit sehingga menghambat pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan lain mengingat kurangnya pengetahuan serta

keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam manajemen aset. Terakhir rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta semakin menyulitkan pemanfaatan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Permana et al., 2024).

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu proses pendataan aset tetap dan barang milik daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) telah dilakukan namun belum optimal. Hal ini terlihat dari pengawasan yang sering menemukan ketidakakuratan data seperti aset yang seharusnya sudah tidak digunakan atau rusak/hilang, tetapi masih tercatat dalam daftar pengelolaan. Penghapusan barang milik daerah dari daftar pengelolaan memerlukan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang guna membebaskan pengguna, kuasa pengguna, atau pengelola dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang tersebut. Khususnya di Disporapar yang memiliki jumlah aset relatif banyak, sering kali tidak diketahui secara jelas siapa pemegang atau pemiliknya. Akibatnya status aset tidak diketahui apakah rusak, hilang, atau masih layak pakai dan sulit dilacak, sehingga pengendalian pemeliharaan, dan perbaikan menjadi tantangan berat karena keterbatasan anggaran (Abdullah et al., 2025).

Penelitian lain menunjukkan hal yang sama dimana masih terdapat aset yang tidak terpakai atau tidak dirasakan manfaat ekonomi dan atau sosialnya. Pada tahun 2017 Bupati Lombok Tengah sudah memperhatikan aset pemerintah yang tidak dikelola dengan baik atau bahkan terbengkalai. Sampai dengan juni 2024 pengelolaan aset tersebut tidak mengalami perbaikan. Masih terdapat aset

terbengkalai lainnya, seperti bekas kantor Bupati, Aerotel, dan bekas kantor Dinas Pendidikan (Disdik) (Umam et al., 2024).

Penelitian lain menyebutkan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi kebutuhan sebagai objek retribusi pemanfaatan aset daerah. Dengan informasi yang terbatas, keberadaan aset tersebut masih sekedar inventaris semata, belum optimal pada pemanfaatan untuk retribusi daerah. Penelitian Wicaksana (2023) mencatat terdapat 66% aset (atau sebanyak 2.770 dari total 10.225 bidang) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki sertifikat. Pencatatan dan legalitas masih belum sinkron sehingga upaya pengamanan kurang optimal. Ketersediaan data aset daerah yang baik dan lengkap menjadi kunci optimalisasi pengelolaan aset (Sofianto et al., 2025).

Di sisi lain beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi pengelolaan aset tetap dan Barang Milik Daerah. Salah satu bukti keberhasilan pengelolaan aset tetap dan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik, dan Perwali Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Rania et al., 2023).

Keberhasilan pengelolaan aset tetap dan Barang Milik Daerah juga terlihat pada Pemerintah Kabupaten Banggai. Secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, mencakup 13 siklus utama seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Hal ini selaras dengan contoh keberhasilan di mana BPKAD menerapkan prosedur akuntansi aset tetap secara efektif, termasuk penetapan anggaran belanja aset tetap hingga penghapusan, pencatatan laporan, dan pengklasifikasian sesuai PSAP No.07 untuk aset dimanfaatkan >12 bulan, dengan koordinasi antar-SKPD yang memastikan realisasi tepat sasaran (Yusni et al., 2025).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat adanya beberapa ketimpangan yang cukup terlihat antara daerah yang mulai berhasil dengan daerah yang masih kesulitan dalam mengelola aset tetap dan Barang Milik Daerah. Beberapa daerah sudah mampu mengoptimalkan pengelolaan melalui sistem yang terintegrasi, pengaplikasian teknologi, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga aset yang dimiliki oleh daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam kondisi lain masih terdapat banyak daerah yang menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya dalam administrasi, kurangnya pemanfaatan aset, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian mengenai pengelolaan aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya telah banyak dilakukan. Berbagai penelitian sebelumnya membahas

pengelolaan aset tetap daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta pengaruhnya terhadap PAD. Sebagian besar penelitian menggunakan metode kuantitatif, studi kasus pada pemerintah daerah tertentu, maupun pendekatan deskriptif.

Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada objek atau daerah tertentu sehingga belum terdapat gambaran secara menyeluruh mengenai perkembangan penelitian ini. Selain itu penelitian sebelumnya juga belum menunjukkan bagaimana tren penelitian berkembang dari tahun ke tahun, topik apa yang sering diteliti, serta tema penelitian apa yang masih jarang dibahas. Masih banyak juga penelitian yang belum memetakan hubungan antarpeneliti maupun perkembangan kata kunci yang digunakan dalam penelitian terkait. Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui arah perkembangan penelitian dan melihat peluang penelitian yang masih dapat dikembangkan di masa mendatang. Kondisi ini menyebabkan peneliti selanjutnya masih kesulitan menemukan celah penelitian yang benar-benar baru dan relevan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometrik untuk memetakan perkembangan penelitian terkait pengelolaan aset tetap dan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk peningkatan PAD. Analisis bibliometrik merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan memetakan publikasi ilmiah secara kuantitatif sehingga dapat diketahui perkembangan penelitian, tren topik, jaringan kolaborasi, serta kata kunci yang dominan dalam suatu bidang penelitian.

Dalam penelitian ini, proses analisis yang dilakukan menggunakan aplikasi *VOSviewer* untuk memvisualkan jaringan penelitian dan metode PRISMA untuk membantu proses seleksi data penelitian secara sistematis. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan sebelumnya karena tidak hanya membahas hasil penelitian terdahulu tetapi juga memetakan perkembangan penelitian secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai arah perkembangan kajian di bidang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Bibliometrik mengenai Pengelolaan Aset Tetap dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren perkembangan publikasi ilmiah mengenai pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2021–2025 berdasarkan analisis bibliometrik.
2. Bagaimana pola kolaborasi penulis (*co-authorship*) dalam penelitian mengenai pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah selama periode 2021–2025.
3. Bagaimana pemetaan kata kunci (*co-occurrence keywords*) yang muncul dalam literatur mengenai pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
4. Bagaimana struktur jaringan sitasi bersama (*co-citation*) antar penulis maupun jurnal dalam kajian pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
5. Bagaimana keterkaitan dokumen berdasarkan analisis *bibliographic coupling* dalam penelitian mengenai pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
6. Bagaimana evolusi dan perkembangan topik penelitian dari waktu ke waktu berdasarkan hasil *overlay visualization* pada analisis bibliometrik.
7. Apa saja peluang dan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis bibliometrik terkait pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tren perkembangan publikasi ilmiah mengenai pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2021–2025 berdasarkan analisis bibliometrik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola kolaborasi penulis (*co-authorship*) dalam penelitian mengenai pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah selama periode 2021–2025.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemetaan kata kunci (*co-occurrence keywords*) yang muncul dalam literatur mengenai pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur jaringan sitasi bersama (*co-citation*) antar penulis maupun jurnal dalam kajian pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan dokumen berdasarkan analisis *bibliographic coupling* dalam penelitian mengenai pengelolaan

aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis evolusi dan perkembangan topik penelitian dari waktu ke waktu berdasarkan hasil *overlay visualization* pada analisis bibliometrik.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis peluang dan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis bibliometrik terkait pengelolaan aset tetap, pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat dan kegunaan yang bersifat langsung maupun tidak langsung bagi peneliti, pihak umum, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis terkait pengelolaan aset tetap dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) serta hubungannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pendekatan analisis bibliometrik, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan, tren,

serta pola penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis menjelaskan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat merasakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama

yang berkaitan dengan topik-topik dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi fisik tertentu karena menggunakan metode analisis bibliometrik. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah berupa jurnal yang diakses secara daring melalui portal jurnal seperti Scopus, Google Scholar dan portal jurnal elektronik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini mengambil sumber literatur yang dipublikasi dalam rentang waktu tahun 2021–2025.